

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MALANG

(Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)

Oleh :

Adelia Shabrina Prameka

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Dosen Pembimbing :

Dr. Nur Khusniyah Indrawati, SE., MSi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

ABSTRACT

Kabupaten Malang was given opportunity to explore the potential of financial resources by setting taxes and charges for the region to increase the acceptance of PAD. The research aims to analyze the contribution and effectiveness local taxation and charges to the PAD of Kabupaten Malang during the last five years (2007-2011). The object in this research is an area of Kabupaten Malang, research focusing to discuss about the PAD, local taxation, and local charges. Research type in this study was a descriptive. Analysis of local taxation and local charges to the PAD in the research carried out using the contributions analysis tax and charges to the total PAD each year and the effectiveness ratio of targets and realization. The results of this research found that average contribution local taxation and local charges type in receipt PAD Kabupaten Malang during 2007-2011 is greatly fluctuates. The biggest tax contributions comes from street lighting tax, averaging 36,4% over five years. As for the largest local charges contribution comes from public services charges, averaging 22,73% over five years. The larger percentage of contribution of a local tax and local charges to the total PAD, then the more big contribution of the tax and charges to the acceptance of PAD an area. This research contributes to the Kabupaten Malang government to better see the potential area which is owned to add value to the contribution of local tax and local charge as well as improve the performance of DPPKA.

Key words : Contribution Analysis, Local Tax, Local Charges, Regional Income, PAD, Kabupaten Malang, Effectiveness, Effectiveness Ratio

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan

kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah.

Kabupaten Malang adalah salah satu dari 38 Kabupaten/ Kota Daerah Tingkat II yang ada di Jawa Timur. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari Kabupaten Malang dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD Kabupaten Malang, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Malang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah dan retribusi yang sudah ada.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Penggalan pajak daerah dan retribusi daerah masih dilakukan secara konvensional. Dua komponen PAD inilah yang paling bisa dilihat penerimaannya dari potensi yang dimiliki Kabupaten Malang.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba meneliti mengenai potensi daerah Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kontribusi tiap pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui kontribusi tiap retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang dicapai tiap jenis pajak di Kabupaten Malang.
4. Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang dicapai tiap jenis retribusi daerah di Kabupaten Malang.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:67) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah."

Adapun yang menjadi dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2009:51) adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Sunarto (2005:15) "Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD".

Menurut Sunarto (2005:15) dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yakni:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi.
2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten dan kota

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap "menempatkan" sesuai dengan fungsinya.

Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2009:63) "Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

Objek Retribusi Daerah

Objek dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Peizinan tertentu

Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Nanik (2010) pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi:

1. Analisis Penerimaan
2. Analisis Pengeluaran

3. Analisis Anggaran

b. Analisis Kontribusi dan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Analisis Kontribusi

Menurut Widodo (1990:20) dalam Dasril, Henry dan Hessel (2004:22) Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD.

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pengukuran tingkat efektifitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2002)

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam mengelola keuangan daerahnya, dan menerapkan konsep perhitungan rasio kontribusi, dan rasio efektifitas yaitu dengan menghitung kedua rasio dari tiap pos-pos dalam Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 s/d 2011. Sifat penelitian ini adalah replikatif.

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Malang dengan memfokuskan penelitian untuk membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 s/d 2011. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas

Pendapatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data kuantitatif yang digunakan adalah data yang termuat dalam Laporan target dan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang mulai tahun 2007 s/d 2011, serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Data-data yang dikumpulkan:

1. Data target dan realisasi jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Malang tahun 2007 s/d 2011
2. Data target dan realisasi jenis-jenis retribusi daerah Kabupaten Malang tahun 2007 s/d 2011
3. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun 2007 s/d 2011

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, studi yang digunakan adalah studi *time series*. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu kontribusi dan tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD adalah analisis rasio dengan rasio-rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kontribusi

- a. Kontribusi per jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b. Kontribusi per jenis retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektifitas

- a. Mengukur efektifitas per jenis pajak daerah tahun 2007-2011

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Target per jenis pajak}} \times 100\%$$

- b. Mengukur efektifitas per jenis retribusi daerah tahun 2007-2011

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis retribusi}}{\text{Target per jenis retribusi}} \times 100\%$$

Adapun nilai efektifitas, perbandingan diukur dengan kriteria penilaian kinerja anggaran dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Dasril Muir (2004:49)

Tahapan Analisis

Guna menjawab semua permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dilakukan dalam dua alat analisis seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu menggunakan analisis kontribusi dan rasio efektifitas. Dimana kedua metode analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD serta tingkat efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Malang.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Singarimbun (1995:25) Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak daerah Kabupaten Malang yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk pembangunan daerah. Untuk perkembangan pajak daerah sendiri dapat dilihat dari Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Malang

2. **Retribusi Daerah**
Retribusi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. **Pendapatan Asli Daerah**
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah Kabupaten Malang sebagai daerah otonom dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan dan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. **Hubungan antar variabel penelitian**
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka penelitian dapat meneliti peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam PAD setelah adanya otonomi daerah dan perubahan yang menyertainya, melalui realisasi dan target pajak daerah, retribusi daerah dan PAD yang telah ditetapkan dan diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Malang selama lima tahun (2007 s/d 2011)

HASIL PEMBAHASAN

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Malang

Hingga tahun 2012 Kabupaten Malang mengelola 10 jenis pajak daerah dan 31 retribusi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2
Jenis Pajak Daerah Kabupaten Malang

NO	PAJAK DAERAH
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Galian Golongan C
7	Pajak Parkir
8	Pajak Air Tanah
9	Pajak Sarang Burung
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang

Tabel 4.3
Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Malang

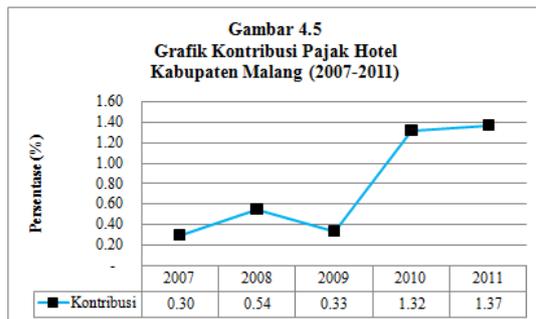
NO	RETRIBUSI DAERAH
A	Retribusi Jasa Umum
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Din. Kesehatan)
2	Ret. Persampahan/kebersihan (Din Perkim)
3	Ret. Persampahan/kebersihan (RSD)
4	Ret. Persampahan/kebersihan (Din Cipta Karya)
5	Biaya Cetak KTP & Akte
6	Ret Pemakaman dan& Pengabuan Mayat
7	Retribusi Parkir ditepi jalan umum
8	Retribusi Pelayanan Pasar
9	Retribusi Pasar Mantung
10	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
11	Retribusi Jasa Umum (Sewa Wales) Bina Marga
12	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
B	Retribusi Jasa Usaha
1	Retribusi Kekayaan Daerah (Rumah Sakit Daerah)
2	Retribusi Kekayaan Daerah (Din Pengairan)
3	Retribusi Kekayaan Daerah (Din Cipta Karya)
4	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	Retribusi Terminal
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir
7	Retribusi Rumah Potong Hewan
8	Ret tempat Rekreasi & Olah Raga
9	Sewa Tanah dan Bangunan
10	Wendit Water Park
C	Retribusi Perijinan Tertentu
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
2	Ijin Bangunan (Tower)
3	Ijin Gangguan (HO)
4	Ijin Gangguan (HO) Bangunan Tower
5	Retribusi Ijin Trayek
6	Retribusi IPPT
7	Ret Ijin Ketenaga kerjaan
8	Ret Ijin Perubahan tanah basah menjadi kering
9	Retribusi Ijij mendirikan bangunan di atas perairan

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Malang Tahun 2007-2011

Persoalan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan PAD. Untuk mengetahui kontribusi per jenis pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh, disajikan penjabarannya sebagai berikut:

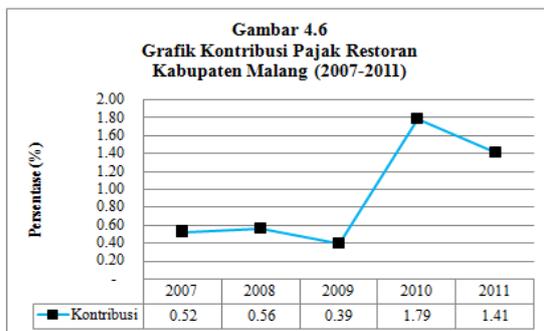
a) Kontribusi Pajak Hotel



Sumber: Data diolah 2013

Diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2007-2011 memiliki tingkat kontribusi yang kecil. dimana tingkat kontribusinya hanya mencakup persentase kisaran 0,3% hingga 1,37% dengan rata-rata selama 5 tahun tersebut adalah sebesar 0,77%. Berdasarkan observasi lapangan hal ini disebabkan kurangnya fasilitas perhotelan di Kabupaten Malang. meskipun objek wisata Kabupaten Malang yang sangat banyak mulai dari gunung hingga pantai namun fasilitas penginapannya kurang memadai. Hal ini berdampak pada penerimaan pemerintah dari segi pajak hotel. Jenis hotel yang dimaksud dalam pajak hotel ini untuk Kabupaten Malang hanya 2 jenis yaitu: a) Hotel Melati Satu. b) Penginapan/Losmen/ Wisma.

b) Kontribusi Pajak Restoran



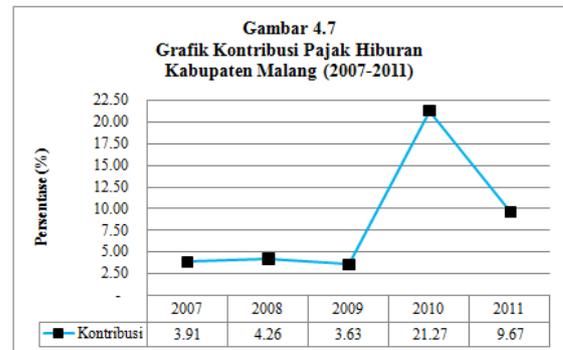
Sumber: Data diolah 2013

Penerimaan PAD dari pajak restoran cenderung meningkat dalam lima tahun namun pada tahun 2009 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan hal ini dikarenakan pada tahun 2009 pajak-pajak yang lain memberikan sumbangsih yang jauh lebih besar dibanding pajak restoran.

Jika dilihat dari persentase kontribusi pajak restoran yang tidak besar. Hal ini yang dilakukan mengindikasikan bahwa gaya hidup masyarakat Kabupaten Malang kurang konsumtif di wilayahnya sendiri, sehingga

mengakibatkan tidak banyaknya kafe, resto, rumah makan berdiri di wilayah Kabupaten Malang. Hanya beberapa wilayah kecamatan saja yang lahannya digunakan untuk usaha makanan.

c) Kontribusi Pajak Hiburan

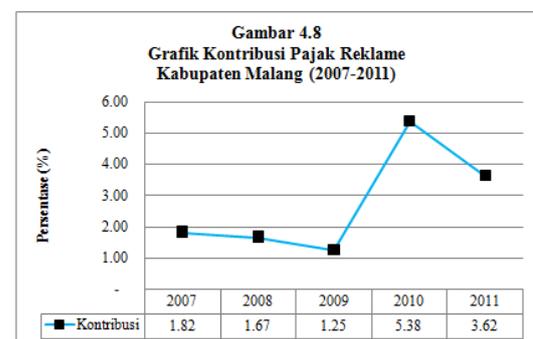


Sumber: Data diolah 2013

Penerimaan PAD dari pajak hiburan dari data di atas dapat mengindikasikan adanya kontribusi yang fluktuatif. Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD yang paling rendah selama 5 tahun terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,63%. sedangkan kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 21,27%.

Jenis tempat hiburan dan hiburan di Kabupaten Malang yang terkena pungutan pajak adalah pagelaran kesenian/musik/tari, karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi, pertandingan olah raga, taman wisata dan sejenisnya.

d) Kontribusi Pajak Reklame

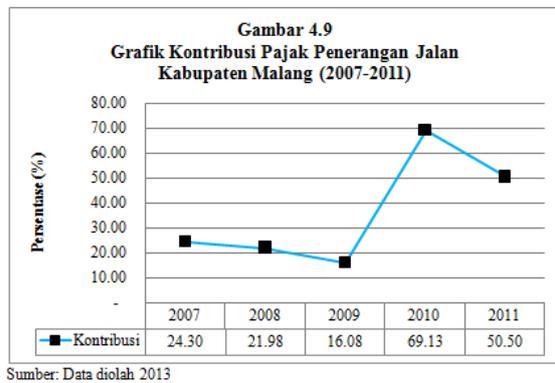


Sumber: Data diolah 2013

Penerimaan PAD dari pajak reklame dilihat dari realisasi pajak reklame terus meningkat di tiap tahunnya. Tiga tahun pertama kontribusi pajak reklame mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak terhadap realisasi PAD. Kontribusi pajak reklame terbesar diperoleh pada tahun 2010 sebesar 5,38% , sedangkan untuk tahun

2011 kontribusi pajak reklame menurun menjadi 3,62%. Sebagai kawasan jalur lingkaran selatan yang sering dilewati para pengguna jalan antar kota, keberadaan reklame komersial di Kabupaten Malang memang diharapkan dapat menjadi salah satu kantong pendapatan yang dapat mendongkrak PAD Kabupaten Malang. Begitu halnya seperti reklame yang berada di dalam Stadion Kanjuruhan pada saat liga sepakbola berlangsung, reklame-reklame tersebut juga menjadi salah satu peluang pungutannya.

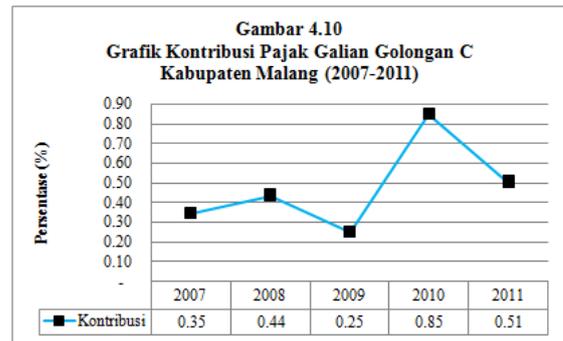
e) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan



Penerimaan PAD dari pajak penerangan jalan untuk 3 tahun pertama mengalami penurunan. pada tahun 2010 merupakan peningkatan kontribusi pajak penerangan jalan yang paling besar selama rentan tahun 2007-2011. Kontribusi pajak penerangan jalan pada 2010 juga memberikan sumbangsih kontribusi sebesar 69,13% , persentase ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2010 kontribusi pajak penerangan jalan menyumbang 19,13% lebih dari separuh total realisasi PAD.

Pajak penerangan jalan menjadi penyumbang/berkontribusi paling besar terhadap PAD Kabupaten Malang dibanding jenis pajak lainnya. Kontribusi besar ini juga masih berlangsung sampai sekarang. Besarnya penerimaan yang diperoleh di sektor pajak penerangan jalan disebabkan karena dasar pemungutan pajak penerangan jalan sangat jelas dan pasti.

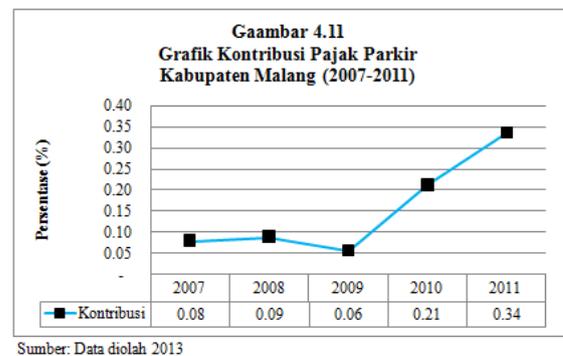
f) Kontribusi Pajak Galian Golongan C



Persentase kontribusi paling besar terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,85%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak galian golongan C selama tahun 2007-2009 mengalami fluktuatif. Kontribusi paling rendah terdapat pada tahun 2009 yaitu 0,25%.

DPPKA Kabupaten Malang menyatakan bahwa delapan jenis bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Malang adalah batu kapur, pasir sungai, pasir urug, kerikil/batu sungai, batu gunung, bentonite, phira pilit, dan marmer, hanya pasir sungai yang memberikan sumbangsih pungutan pajak paling besar.

g) Kontribusi Pajak Parkir



Penerimaan PAD dari pajak parkir kontribusinya cenderung fluktuatif naik tidak terlalu banyak pada tahun 2007 dari 0.08% menjadi 0,09% pada tahun 2008 dan turun menjadi 0,06 pada tahun 2008 yang kemudian meningkat di dua tahun terakhir 0,21% pada tahun 2010 dan 0,34% pada tahun 2011.

Kontribusi pajak parkir di Kabupaten Malang sendiri tidak begitu banyak memberikan sumbangsih dikarenakan. pungutan terhadap lahan yang tidak terlalu banyak. DPPKA Kabupaten Malang hanya bisa mengambil pungutan pada

tempat keramaian seperti pasar, rumah sakit dan beberapa tempat wisata

h) Kontribusi Pajak Air Tanah

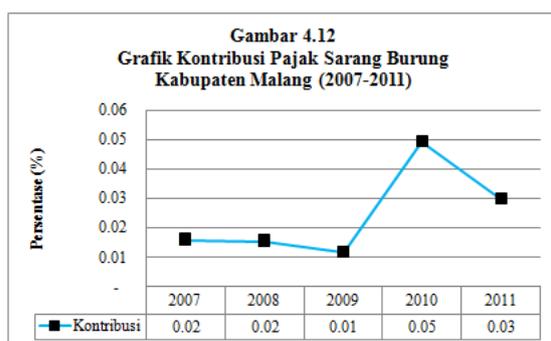
Tabel 4.12
Kontribusi Pajak Air Tanah Kabupaten Malang (2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
1	2007	-	84.353.396.934.00	-
2	2008	-	102.706.250.226.93	-
3	2009	-	153.526.441.536.00	-
4	2010	-	39.362.653.309.00	-
5	2011	1.466.356.422	64.689.653.942.00	2,27

Sumber: Data diolah 2013

Realisasi PAD pajak air tanah pertama kali mencapai Rp 1.466.356.422 angka ini memberikan persentase sebesar 2,27% pada PAD Kabupaten Malang. Ini merupakan persentase kontribusi yang menghasilkan bagi PAD Kabupaten Malang di awal pemungutan pajak air tanah.

i) Kontribusi Pajak Sarang Burung



Sumber: Data diolah 2013

Kontribusi pajak sarang burung terhadap PAD sendiri juga sangat kecil hanya kisaran 0,01% hingga 0,05%. Kontribusi paling kecil ada pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,01% dan kemudian meningkat tajam menjadi 0,05% di tahun 2010. Pajak sarang burung merupakan penerimaan pajak atas pengusahaan sarang burung wallet di wilayah Kabupaten Malang.

j) Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tabel 4.14
Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Malang (2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
1	2007	-	84.353.396.934.00	-
2	2008	-	102.706.250.226.93	-
3	2009	-	153.526.441.536.00	-
4	2010	-	39.362.653.309.00	-
5	2011	19.598.888.116	64.689.653.942.00	30,30

Sumber: Data diolah 2013

Penerimaan realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk

tahun pertama pemungutan sangat memberikan kontribusi kepada realisasi PAD yaitu sebesar 30,30% dengan realisasi pajak bea perolehan sebesar Rp 19.598.888.116. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014.

Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang Tahun 2007-2011

Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2007 hingga 2011 disajikan dalam Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15
Rata-rata Kontribusi Perjenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Malang Tahun 2007-2011
(Dalam Rupiah)

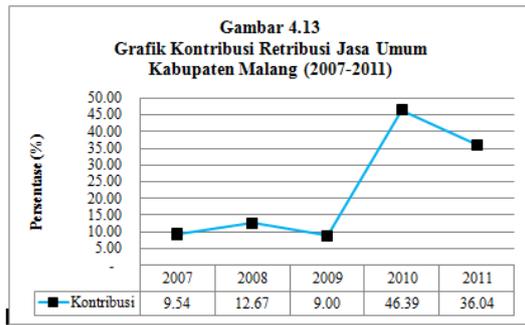
No	Jenis Pajak	Rata-rata (%)
1	Pajak Hotel	0,77
2	Pajak Restoran	0,93
3	Pajak Hiburan	8,55
4	Pajak Reklame	2,75
5	Pajak Penerangan Jalan	36,40
6	Pajak Galian Golongan C	0,48
7	Pajak Parkir	0,15
8	Pajak Air Tanah	-
9	Pajak Sarang Burung	0,02
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-

Sumber: Data diolah 2013

Kontribusi per jenis pajak daerah terhadap penerimaan PAD dalam kurun waktu tahun anggaran 2007-2011 sangat fluktuatif. Kontribusi pajak terbesar pada penerimaan PAD adalah pajak penerangan jalan yang kemudian diikuti oleh pajak hiburan. Pajak penerangan jalan memberikan rata-rata kontribusi sebesar 36,4% selama 5 tahun dan yang paling terendah adalah rata-rata pajak sarang burung yaitu sebesar 0,02% saja.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang Tahun 2007-2011

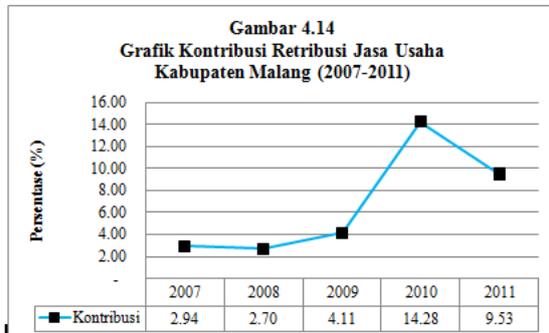
a) Kontribusi Retribusi Jasa Umum



Sumber: Data diolah 2013

Penerimaan PAD dari retribusi jasa umum cenderung fluktuatif dan dari peningkatan realisasi dapat dilihat terus meningkat, seperti disajikan pada perhitungan diatas. Tahun 2010 kontribusi retribusi jasa umum yang paling tertinggi yaitu 46,39% sedangkan kontribusi terendah ada pada tahun 2009 sebesar 9%. Seperti yang diketahui, retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

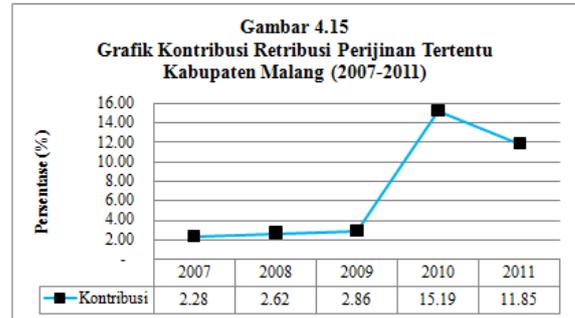
b) Kontribusi Retribusi Jasa Usaha



Sumber: Data diolah 2013

Persentase kontribusi pada tahun 2007 sebesar 2,94% kemudian menurun menjadi 2,7% pada 2008 dan meningkat di tahun 2009 dan 2010 menjadi 4,11% dan 14,28%. namun terjadi penurunan menjadi 9,53% pada tahun 2011. Persentase kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu sebesar 14,28%. Semakin tinggi penerimaan sektor retribusi jasa usaha. maka semakin berkembang usaha yang ada di Kabupaten Malang, baik usaha kecil menengah maupun besar.

c) Kontribusi Retribusi Perijinan Tertentu



Sumber: Data diolah 2013

Penerimaan PAD Kabupaten Malang dari realisasi retribusi perijinan tertentu cenderung meningkat terus hingga tahun ke 5 (2007-2011), seperti disajikan dalam Gambar 4.15.

Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Malang Tahun 2007-2011

Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2007 hingga 2011 disajikan dalam Tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19
Rata-rata Kontribusi Perjenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Malang Tahun 2007-2011

No	Jenis Retribusi	Rata-rata (%)
1	Retribusi Jasa Umum	22,73
2	Retribusi Jasa Usaha	6,71
3	Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	6,96

Sumber: Data diolah 2013

Kontribusi tiap jenis retribusi daerah terhadap penerimaan PAD dalam kurun waktu tahun anggaran 2007 hingga 2011 sangat fluktuatif. Kontribusi terbesar terdapat pada jenis retribusi jasa umum yaitu dengan rata-rata kontribusi lima tahun sebesar 22,73%. Semakin besar persentase kontribusi suatu jenis pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun tersebut, maka semakin besar kontribusi jenis pajak tersebut terhadap penerimaan PAD di wilayah Kabupaten Malang (Sumber: DPPKA Kabupaten Malang)

Efektifitas Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Malang Tahun 2007-2011

Rasio Efektifitas PAD ini menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah

dianggarkan tersebut dilihat dari target dan realisasi perjenis komponen PAD.

a) Efektifitas Pajak Hotel

Tabel 4.21
Efektifitas Pajak Hotel Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	275.000.000	249.132.614	90,59	Efektif
2	2008	350.000.000	558.313.434	159,52	Sangat Efektif
3	2009	375.000.000	510.042.122	136,01	Sangat Efektif
4	2010	400.000.000	519.984.875	130,00	Sangat Efektif
5	2011	500.000.000	883.498.569	176,70	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak hotel terjadi peningkatan dari tahun 2007 sebesar 90,59% menjadi 159,52% pada 2008, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 136,01% dan tahun 2010 sebesar 130%. Pencapaian efektifitas tertinggi terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 176,70%. Penerimaan pajak hotel selalu memenuhi target mulai tahun 2008 hingga 2011 dengan kategori sangat efektif.

b) Efektifitas Pajak Restoran

Tabel 4.22
Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	500.000.000	439.984.383.00	88,00	Cukup Efektif
2	2008	500.000.000	574.496.651.00	114,90	Sangat Efektif
3	2009	550.000.000	602.758.526	109,59	Sangat Efektif
4	2010	575.000.000	703.299.002	122,31	Sangat Efektif
5	2011	600.000.000	910.551.943	151,76	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak restoran terjadi peningkatan dari kriteria cukup efektif menjadi sangat efektif. Diketahui bahwa setiap tahunnya DPPKA menaikkan target anggaran bagi pajak restoran, diikuti dengan hasil realisasinya yang juga terus meningkat melampaui target. Ini menandakan bahwa target anggaran yang ditentukan oleh DPPKA realistis dan menggambarkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran baik. Pemungutan pajak restoran mulai masuk kategori sangat efektif pada tahun 2008, mulai tahun tersebut pemerintah melakukan pengukuran potensi daerah pada Kabupten Malang secara menyeluruh pada setiap wajib pajak restoran.

c) Efektifitas Pajak Hiburan

Tabel 4.23
Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	2.875.000.000	3.301.524.243	114,84	Sangat Efektif
2	2008	3.200.000.000	4.379.470.871	136,86	Sangat Efektif
3	2009	3.500.000.000	5.566.298.075	159,04	Sangat Efektif
4	2010	5.000.000.000	8.373.470.995	167,47	Sangat Efektif
5	2011	6.000.000.000	6.252.826.091	104,21	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Jika dilihat dari target dan realisasi pajak hiburan selalu memenuhi target anggaran dengan kategori kriteria sangat efektif selama 5 tahun. Untuk persentase efektifitas penerimaan pajak hiburan terjadi peningkatan terus selama 4 tahun (2007-2010) dari 114,84% hingga 167,47% namun untuk tahun 2011 mengalami penurunan yang nyaris tidak memenuhi target yaitu sebesar 104,21%. Untuk target pajak hiburan seperti pajak daerah lainnya. DPPKA selalu memasang target yang lebih tinggi di setiap tahunnya, dikarenakan potensi hiburan dari segi pariwisata Kabupaten Malang yang selalu dikembangkan oleh pemerintah.

d) Efektifitas Pajak Hiburan

Tabel 4.24
Efektifitas Pajak Reklame Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	1.225.000.000	1.531.993.038	125,06	Sangat Efektif
2	2008	1.500.000.000	1.711.460.733	114,10	Sangat Efektif
3	2009	1.560.000.000	1.917.704.505	122,93	Sangat Efektif
4	2010	2.000.000.000	2.118.632.810	105,93	Sangat Efektif
5	2011	2.083.000.000	2.343.899.286	112,53	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Dilihat dari realisasi pajak reklame yang selalu meningkat dan target anggaran yang ditingkatkan pula oleh DPPKA ini memberikan hasil persentase efektifitas penerimaan pajak reklame yang fluktuatif selama 5 tahun (2007-2011). Meskipun efektifitas pajak reklame naik-turun persentase efektifitasnya tetap mencapai/melebihi target anggarannya dengan kategori kriteria sangat efektif. Persentase efektifitas penerimaan pajak reklame terbaik ada pada tahun 2007 dengan persentase sebesar 125,06% dan efektifitas terendah ada pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 105,93%.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklamae, DPPKA berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya, target ini telah dibuat dengan patokan dasar pada penerimaan tahunan pada tahun sebelumnya.

e) Efektifitas Pajak Penerangan Jalan

Tabel 4.25
Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	18.500.000.000	20.496.580.392	110,79	Sangat Efektif
2	2008	20.750.000.000	22.576.981.992	108,80	Sangat Efektif
3	2009	21.750.000.000	24.693.107.991	113,53	Sangat Efektif
4	2010	22.825.000.000	27.210.474.002	119,21	Sangat Efektif
5	2011	25.500.000.000	32.670.378.694	128,12	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Jika dilihat dari persentase efektifitas pajak penerangan jalan sudah memenuhi target anggaran. dimana tingkat persentasenya cukup fluktuatif dengan kategori kriteria sangat efektif. untuk tahun 2008 sempat mengalami penurunan menjadi 108,8% dari 110,79% pada tahun 2007. Setelah penurunan persentase dari tahun ke tahun mulai meningkat dari 113,53% pada tahun 2009 hingga 128,12% pada tahun 2011. Kinerja DPPKA Kabupaten Malang dalam melakukan pemungutan pajak penerangan jalan sudah baik bisa dilihat dari terus meningkatnya target dan realisasi pajak penerangan jalan.

f) Efektifitas Pajak Galian Golongan C

Tabel 4.26
Efektifitas Pajak Galian Golongan C Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	385.000.000	293.093.903	76,13	Kurang Efektif
2	2008	385.000.000	449.462.562	116,74	Sangat Efektif
3	2009	385.000.000	387.170.107	100,56	Sangat Efektif
4	2010	385.000.000	333.856.505	86,72	Cukup Efektif
5	2011	300.000.000	327.057.271	109,02	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Efektifitas penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 tidak mencapai target bahkan masuk dalam kategori kriteria kurang efektif yaitu sebesar 76,13%, namun pada tahun 2008, 2009, dan 2011 pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C telah mencapai target bahkan melebihi target anggaran yang ditentukan. Namun pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan dan tidak memenuhi target yaitu sebesar 86,72% dengan kategori kriteria cukup efektif.

g) Efektifitas Pajak Parkir

Tabel 4.27
Efektifitas Pajak Parkir Kabupaten Malang (2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	55.000.000	67.222.300	122,22	Sangat Efektif
2	2008	65.000.000	91.284.640	140,44	Sangat Efektif
3	2009	70.000.000	87.593.560	125,13	Sangat Efektif
4	2010	74.000.000	83.557.120	112,92	Sangat Efektif
5	2011	150.000.000	216.846.800	144,56	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Hasil dari perhitungan persentase efektifitas penerimaan pajak parkir menunjukkan bahwa efektifitasnya selalu masuk dalam kategori kriteria sangat efektif dimana kisaran efektifitas selama 5 tahun (2007-2011) adalah sebesar 112,92% - 144,56%. Tahun 2008 efektifitas pajak parkir meningkat menjadi 140,44% dari 122,22% pada tahun 2007. Namun di tahun 2009 dan 2010 efektifitas penerimaan pajak parkir mengalami penurunan menjadi 125,13% dan 112,92%, kemudian baru meningkat secara signifikan efektifitas penerimaannya menjadi 144,56% dan ini menjadi persentase efektifitas tertinggi selama 5 tahun (2007-2011). Perhitungan menunjukkan bahwa pajak parkir merupakan pajak yang penentuan target anggarannya selalu sesuai dan bisa direalisasikan.

h) Efektifitas Pajak Air Tanah

Tabel 4.28
Efektifitas Pajak Air Tanah Kabupaten Malang (2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	-	-	-	-
2	2008	-	-	-	-
3	2009	-	-	-	-
4	2010	-	-	-	-
5	2011	1.100.000.000	1.466.356.422	133,31	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Efektifitas pajak air tanah masih belum bisa dibandingkan efektifitasnya dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pajak air tanah baru dilaksanakan pengutannya pada tahun 2011. Meskipun pajak ini baru dipungut sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak air tanah sudah bisa menunjukkan bahwa penerimaan pajak ini efektif dan bahkan masuk dalam kategori sangat efektif dengan persentase 133,31% dari pencapaian target anggaran. Tingkat efektifitas yang ditunjukkan oleh pajak air tanah menunjukkan bahwa kinerja DPPKA pada awal pemungutan pajak air tanah adalah baik dan target yang ditentukan dapat dicapai

i) Efektifitas Pajak Sarang Burung

Tabel 4.29
Efektifitas Pajak Sarang Burung Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	17.500.000	13.483.000	77,06	Kurang Efektif
2	2008	17.500.000.00	16.101.000.00	92,01	Efektif
3	2009	17.500.000.00	18.200.000	104,00	Sangat Efektif
4	2010	16.000.000	19.378.000	121,11	Sangat Efektif
5	2011	17.000.000	19.350.750	113,83	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Jika dilihat dari persentase efektifitas penerimaan pajak sarang burung, persentasenya meningkat di 4 tahun pertama yaitu pada tahun 2007 efektifitas penerimaan pajak sarang burung sebesar 77,06% dikategorikan kriteria kurang efektif dapat meningkat menjadi 92,01% pada tahun 2008, meningkat lagi menjadi 104% pada tahun 2009 dan peningkatan terakhir dalam kurun waktu 5 tahun terjadi pada tahun 2010 sebesar 121,11% dan peningkatan pada tahun ini merupakan yang paling tinggi. Untuk tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 113,83% dari realisasi dan target sebelumnya.

j) Efektifitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tabel 4.30
Efektifitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Malang (2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	-	-	-	-
2	2008	-	-	-	-
3	2009	-	-	-	-
4	2010	-	-	-	-
5	2011	10.000.000.000	19.598.888.116	195,99	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Sama halnya dengan efektifitas pajak air tanah, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masih belum bisa dibandingkan efektifitasnya dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pajak pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan baru dilaksanakan pengutannya pada tahun 2011. Meskipun pajak ini baru dipungut, pajak pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sudah bisa menunjukkan bahwa penerimaan pajak ini efektif dan bahkan masuk dalam kategori sangat efektif dengan persentase sangat besar hampir dua kali lipat dari target anggaran yaitu 195,99%.

Efektifitas Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Malang Tahun 2007-2011

a) Efektifitas Retribusi Jasa Umum

Tabel 4.31
Efektifitas Retribusi Jasa Umum Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	7.906.833.300	8.046.137.111	101,76	Sangat Efektif
2	2008	12.573.959.000	13.013.108.530	103,49	Sangat Efektif
3	2009	20.193.530.000	13.811.375.820	68,40	Kurang Efektif
4	2010	22.144.038.700	18.259.853.541	82,46	Cukup Efektif
5	2011	22.843.538.700	23.312.346.042	102,05	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Persentase efektifitas penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Malang cukup fluktuatif dengan peningkatan dan penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 103,49% dari 101,76% pada 2007, kemudian persentase efektifitas penerimaan retribusi jasa umum mengalami penurunan yang cukup banyak menjadi 68,4% yang masuk dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2010 persentase efektifitas penerimaan retribusi jasa umum membaik menjadi 82,46% dan masuk dalam kategori cukup efektif. kemudian pada tahun 2011 meningkat lagi hingga mencapai kategori kriteria sangat efektif dengan persentase 102,05%.

b) Efektifitas Retribusi Jasa Usaha

Tabel 4.32
Efektifitas Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	2.014.980.000	2.478.306.790	122,99	Sangat Efektif
2	2008	2.565.271.500	2.777.047.818	108,26	Sangat Efektif
3	2009	8.525.014.000	6.304.729.663	73,96	Kurang Efektif
4	2010	6.232.674.000	5.622.759.126	90,21	Efektif
5	2011	7.235.871.900	6.165.122.303	85,20	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Jika dilihat dari efektifitas penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Malang persentase menunjukkan penurunan selama 3 tahun pertama (2007-2009) dengan persentase dari 122,99% menjadi 108,26% dan penurunan kembali menjadi 73,96% dan masuk dalam kategori kurang efektif pada tahun 2009. Tahun 2010 efektifitas penerimaan retribusi jasa usaha mulai membaik menjadi 90,21% dan masuk kategori kriteria efektif. Namun pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan persentase efektifitas menjadi 85,20% dan masuk dalam kategori kriteria cukup efektif.

c) Efektifitas Retribusi Perijinan Tertentu

Tabel 4.33
Efektifitas Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Malang
(2007-2011)
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
1	2007	1.832.765.000	1.924.517.380	105,01	Sangat Efektif
2	2008	2.122.850.000	2.688.933.609	126,67	Sangat Efektif
3	2009	3.288.900.000	4.396.390.906	133,67	Sangat Efektif
4	2010	3.955.200.000	5.979.137.460	151,17	Sangat Efektif
5	2011	4.632.110.000	7.668.467.193	165,55	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2013

Dilihat dari persentase efektifitas penerimaan retribusi perijinan tertentu terjadi peningkatan disetiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011) dan selalu mencapai targetnya dengan kategori kriteria sangat efektif. Keadaan efektifitas yang terus membaik dilakukan oleh penerimaan retribusi perijinan tertentu dimana target anggaran dan realisasinya terus meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kontribusi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2007 hingga 2011 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 36,40%, dimana pemungutan pajak penerangan jalan masuk dalam pembayaran listrik ke PLN oleh masyarakat. Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan Kabupaten Malang.
2. Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2007 hingga 2011 dari retribusi daerah untuk PAD berasal dari retribusi jasa umum yaitu dengan rata-rata sebesar 22,73%. Retribusi jasa umum di Kabupaten Malang merupakan retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Sedangkan dua retribusi lainnya yaitu retribusi jasa usaha dan perijinan umum tingkat kontribusinya belum sebesar retribusi jasa umum.

3. Tingkat efektifitas dari perjenis pajak daerah di Kabupaten Malang dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis pajak daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) dan/atau kurang efektif (60%-80%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2007-2011 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%). Pajak Daerah di Kabupaten Malang yang selalu masuk dalam kategori sangat efektif (di atas 100%) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. Hal ini tercapai karena realisasi pajak daerah yang lebih besar daripada target yang direncanakan.

4. Tingkat efektifitas dari perjenis retribusi daerah di Kabupaten Malang dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis retribusi daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) dan/atau kurang efektif (60%-80%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2007-2011 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%). Terutama untuk pemungutan retribusi perijinan tertentu yang selalu masuk dalam kategori sangat efektif (di atas 100%). Karena realisasi retribusi daerah yang tercapai lebih besar daripada target yang direncanakan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang.

Saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan PAD, sebagai berikut:

- a. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sudah baik sehingga harus dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan, dengan cara

- memperbaiki system pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan potensi daerah yang ada agar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD semakin besar.
- b. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan, antara lain dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, menyederhanakan proses administrasi pajak dan retribusi daerah, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak.
 - c. Proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya, sebaiknya memperhatikan potensi yang ada sebenarnya, sehingga pemungutannya akan terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan.
 - d. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang di masa yang akan datang dalam penentuan retribusi harus memihak ke masyarakat.
 - e. Mengembangkan usaha-usaha yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan PAD
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian sejenis lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau paradigm *positivist* untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal dan bisa digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Amri Siregar., 2009, *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara*, Skripsi tidak diterbitkan, Medan: FE Universitas Sumatera Utara.

Anonymous, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*, 2001, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI.

_____, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 1997, Jakarta: Lembaran Negara RI Sekretaris Negara RI.

_____, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 125 Sekretaris Negara RI.

_____, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI, No. 126 Sekretaris Negara RI.

_____, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2000, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 246 : Sekretaris Negara RI.

_____, 2009, *Kabupaten Malang Dalam Angka*, BPS Kabupaten Malang (<http://www.malangkab.go.id>, diakses pada tanggal 8 Februari 2013)

_____, 2010. *Gara-gara Hujan, Wendit Gagal Penuhi Target*, (Online), (<http://www.memoarema.com/gara-gara-hujan-wendit-gagal-penuhi-target-6395>, diakses pada tanggal 18 Februari 2013)

Betta Sari Novallita., 2004, *Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor*, Skripsi tidak diterbitkan, Bekasi: FE Universitas Gunadarma Bekasi.

Fachrizar Faisal K., 2007, *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah untuk*

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ambon*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: FE Universitas Muhammadiyah Malang.
- Halim, Abdul., 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- Imam Mukhlis., 2010, Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : *Makalah Seminar Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*.
- Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo., 2009, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad., 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Mahmudi., 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Mahsun, dkk., 2006 *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*, Yogyakarta.: BPFE.
- Mahsun, Mohamad., 2012, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : BPFE.
- Malang Post, Senin, 8 Oktober 2012, *PAD Meningkat Target Dinaikkan*
- Mardiasmo., 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo., 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : ANDI.
- Margaretha Rosalyn., 2009, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara : *Jurnal FE Universitas Kristen Indonesia Maluku Volume III Nomor 1*.
- Mat Juri., 2012, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang : *Jurnal Eksis Vol.8 No.1, Maret 2012, hal 20-31*.
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda., 2002, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : YPAPI.
- Nanik Wahyuni., 2010, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang : *Jurnal Akuntansi FE UIN Maliki Malang*.
- Nugroho, Riant D., 2000, *Otonomi:Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif., 2005, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo.
- Paler-Calmorin, Laurentina., 2007, *Research Methods and Thesis Writing Second Edition*, Philipine : REX Book Store INC.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi., 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sudjana., 2005, *Metode Statistika*, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono., 2006, *Statistika untuk Penelitian*, Cetakan Kesembilan, Bandung : ALFABETA.
- Sunarto., 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka.
- Widodo, Suseno Triyanto., 1990, *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta : Kanisius.
- Yani, Ahmad., 2009, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers.
- www.malangkab.go.id
- www.dppka.malangkab.go.id